

Integrasi Teori Governance Stoker dengan Pendekatan Sosiologi Politik dalam Menganalisis Efektivitas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia

¹Usep Saepul Ahyar, ²Khoirurrosyidin, ³Darmanto Saputro

¹Universitas Serang Raya, Serang, Banten

^{2,3}Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, Jawa Timur

E-mail: usepsaepulahyar@unsera.ac.id; rosyidin.kh@umpo.ac.id; darmantosaputro@umpo.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis integrasi teori governance Stoker dengan pendekatan sosiologi politik dalam mengkaji efektivitas kebijakan desentralisasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa lima proposisi governance Stoker (difusi akuntabilitas, pengaburan batas kelembagaan, pergeseran kekuasaan, penggunaan jaringan mandiri berpemerintahan sendiri, serta kapasitas negara untuk bertindak tanpa memerintah) memberikan kerangka yang relevan untuk menganalisis efektivitas implementasi desentralisasi. Ketika dipadukan dengan pendekatan sosiologi politik yang menekankan budaya politik, modal sosial, dan relasi elite, diperoleh kerangka analisis yang lebih komprehensif. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan desentralisasi di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh dinamika politik lokal, hubungan antarpemerintahan, dan kapasitas birokrasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan di tingkat daerah serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kata kunci: *desentralisasi, governance, sosiologi politik, otonomi daerah, tata kelola pemerintahan*

ABSTRACT

This article analyzes the integration of Stoker's governance theory with a political sociology approach in examining the effectiveness of decentralization policy in Indonesia. Using qualitative-descriptive methods and literature study, this research finds that Stoker's five governance propositions (diffusion of accountability, blurred institutional boundaries, power shifts, the use of autonomous self-governing networks, and the state's capacity to act without commanding) provide a relevant framework for analyzing decentralization effectiveness. When combined with a political sociology approach emphasizing political culture, social capital, and elite relations, a more comprehensive analytical framework emerges. The findings indicate that the effectiveness of decentralization in Indonesia is significantly influenced by local political dynamics, intergovernmental relations, and bureaucratic capacity. The research recommends institutional strengthening at the regional level and improved central-regional coordination.

Keywords: *decentralization, governance, political sociology, regional autonomy, public administration*

PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi di Indonesia merupakan salah satu tonggak penting reformasi pemerintahan yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Forum Group Discussion (FGD) Badan Pengkajian MPR yang diselenggarakan pada 15 April 2026 menyebutkan secara lugas bahwa desentralisasi dan otonomi daerah merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berkeadilan, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan berupa belum optimalnya keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan disharmoni regulasi (MPR RI, 15 April 2026, mpr.go.id). Pernyataan tersebut menegaskan relevansi kajian ilmiah yang mendalam mengenai efektivitas desentralisasi di Indonesia.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbarui melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014, Indonesia telah menjalani proses transformasi besar dalam tata kelola pemerintahan. Desentralisasi bukan sekadar redistribusi administratif, melainkan redistribusi kekuasaan politik dan fiskal dari pusat ke daerah (Rondinelli, 1999; Litvack et al., 1998). Namun, evaluasi kinerja pemerintah daerah tahun 2024 yang dipublikasikan Kementerian Dalam Negeri pada April 2025 mengungkapkan bahwa hanya 9 dari 33 provinsi (27%) yang meraih nilai kinerja tinggi, sementara 21% provinsi masih berada pada kategori rendah atau sangat rendah (Kemendagri, 2025).

Kajian terhadap efektivitas desentralisasi membutuhkan kerangka teoritis yang mampu menangkap kompleksitas fenomena tersebut. Teori *governance* yang dikembangkan oleh Gerry Stoker (1998) menawarkan lima proposisi yang sangat relevan untuk memahami dinamika tata kelola pemerintahan kontemporer. Sementara itu, pendekatan sosiologi politik memberikan dimensi analisis yang lebih kaya dengan menekankan hubungan antara struktur sosial, kekuasaan, dan kebijakan publik (Gramsci, 1971; Putnam, 1993). Integrasi kedua kerangka ini diharapkan menghasilkan perspektif analitis yang lebih holistik dalam memotret efektivitas kebijakan desentralisasi di Indonesia.

Penelitian ini secara khusus bertujuan: pertama, mengidentifikasi proposisi-proposisi teori *governance* Stoker yang relevan bagi analisis kebijakan desentralisasi; kedua, mengintegrasikan dimensi sosiologi politik dalam kerangka analisis tersebut; dan ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan

desentralisasi di Indonesia melalui integrasi kedua pendekatan teoritis tersebut.

LANDASAN TEORI

Teori Governance Stoker

Gerry Stoker (1998) memperkenalkan teori *governance* melalui lima proposisi utama yang menandai pergeseran dari model pemerintahan tradisional menuju model tata kelola yang lebih kolaboratif dan plural. Proposisi pertama menyatakan bahwa *governance* melibatkan seperangkat institusi dan aktor yang tidak hanya berasal dari pemerintahan. Dalam konteks desentralisasi Indonesia, hal ini tercermin dari pelibatan DPRD, sektor swasta, LSM, dan komunitas lokal dalam penyelenggaraan layanan publik.

Proposisi kedua menegaskan adanya pengaburan batas-batas dan tanggung jawab dalam penanganan isu sosial dan ekonomi. Desentralisasi di Indonesia menciptakan lapis-lapis kewenangan yang sering kali tidak terdefinisi dengan jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga menimbulkan tumpang tindih regulasi (Smoke, 2003). Proposisi ketiga menunjukkan adanya ketergantungan kekuasaan dalam hubungan antara institusi-institusi yang terlibat. Dalam konteks desentralisasi, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tidak semata bersifat hierarkis, melainkan juga saling ketergantungan dalam hal sumber daya fiskal dan legitimasi politik (Hutchcroft, 2001).

Proposisi keempat menekankan pentingnya jaringan aktor yang berpemerintahan sendiri (*self-governing networks*). Dalam praktik desentralisasi Indonesia, jaringan ini termanifestasi melalui forum desa, Musrenbang, dan asosiasi pemerintah daerah. Proposisi kelima menekankan bahwa pemerintah memiliki kapasitas untuk menggunakan instrumen-instrumen baru yang tidak bersifat komando langsung untuk mengarahkan dan membimbing (Stoker, 1998, p. 23).

Pendekatan Sosiologi Politik

Sosiologi politik memfokuskan kajiannya pada relasi antara kekuasaan, institusi, dan masyarakat (Lipset, 1981; Almond & Verba, 1963). Dalam konteks analisis desentralisasi, sosiologi politik memberikan tiga dimensi analitis yang penting: budaya politik, modal sosial, dan relasi elite.

Budaya politik mengacu pada orientasi, nilai, dan sikap masyarakat terhadap sistem politik. Almond dan Verba (1963) membedakan tiga tipe budaya politik: parokial, subjek, dan partisipan. Dalam konteks desentralisasi Indonesia, budaya politik yang berkembang bervariasi antarwilayah. Putnam (1993) menambahkan bahwa modal sosial berupa kepercayaan, norma timbal balik, dan jaringan sosial

merupakan prasyarat penting bagi efektivitas pemerintahan daerah. Daerah dengan modal sosial tinggi cenderung menghasilkan tata kelola yang lebih efektif karena warganya lebih aktif berpartisipasi dalam proses kebijakan.

Relasi elite merupakan dimensi ketiga yang krusial. Teori elite Mosca (1939) dan Pareto (1935) menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan tidak pernah sepenuhnya demokratis karena selalu ada kelompok minoritas yang memegang kendali. Dalam konteks desentralisasi Indonesia, munculnya *bossism* lokal dan oligarki daerah menjadi tantangan serius bagi efektivitas kebijakan yang seharusnya memberdayakan masyarakat luas (Sidel, 2004; Hadiz, 2010).

Kerangka Integrasi Teoritis

Integrasi teori *governance* Stoker dengan pendekatan sosiologi politik menghasilkan kerangka analisis tiga dimensi: (1) dimensi kelembagaan-prosedural berbasis Stoker, (2) dimensi sosio-kultural berbasis sosiologi politik, dan (3) dimensi relasi kekuasaan sebagai sintesis keduanya. Jika teori Stoker berfokus pada dimensi kelembagaan dan proses tata kelola, maka sosiologi politik menambahkan dimensi sosio-kultural dan relasi kekuasaan yang membentuk konteks operasi tata kelola tersebut. Sintesis ini memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang

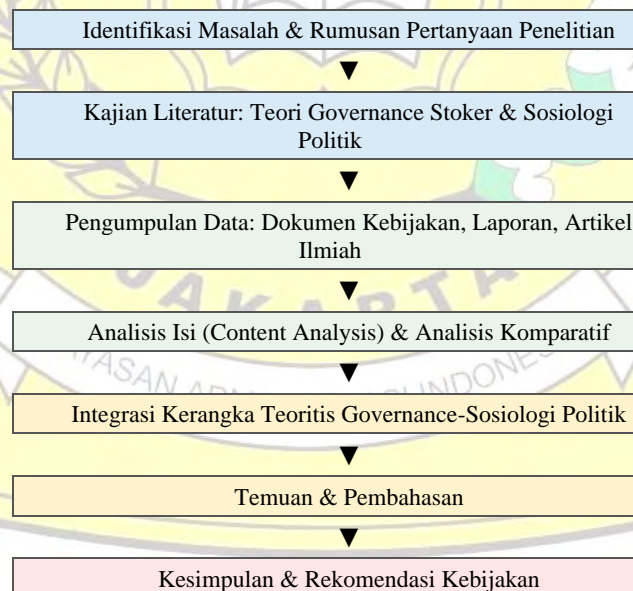
mengapa desentralisasi berhasil di beberapa daerah namun gagal di daerah lain.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*). Data dikumpulkan melalui telaah sistematis terhadap berbagai sumber primer dan sekunder, meliputi: (1) karya-karya akademis tentang teori *governance* dan sosiologi politik; (2) dokumen kebijakan resmi pemerintah terkait desentralisasi; (3) laporan evaluasi kinerja pemerintah daerah; dan (4) publikasi ilmiah hasil penelitian empiris tentang implementasi desentralisasi di berbagai daerah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi proposisi-proposisi utama dalam teori Stoker dan mengkaji relevansinya terhadap konteks desentralisasi Indonesia. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pengalaman berbagai daerah dalam implementasi desentralisasi sehingga dapat diidentifikasi pola-pola umum maupun variasi yang signifikan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori.

Gambar 1 mengilustrasikan alur penelitian yang digunakan dalam studi ini.



Gambar 1. Alur penelitian integrasi teori *governance* Stoker dengan pendekatan sosiologi politik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Proposisi *Governance* Stoker dalam Desentralisasi Indonesia

Pengujian relevansi lima proposisi teori *governance* Stoker terhadap konteks desentralisasi

Indonesia menghasilkan temuan yang menarik. Tabel 1 menyajikan pemetaan antara proposisi Stoker dengan fakta empiris implementasi desentralisasi di Indonesia.

No.	Proposisi Stoker	Manifestasi dalam Desentralisasi Indonesia	Tingkat Relevansi
1	Pluralitas aktor institusional	Keterlibatan DPRD, LSM, swasta, dan komunitas lokal dalam tata kelola daerah	Tinggi
2	Pengaburan batas kelembagaan	Tumpang tindih kewenangan pusat-daerah; ambiguitas UU No. 23/2014	Sangat Tinggi
3	Ketergantungan kekuasaan antarlembaga	Ketergantungan fiskal daerah pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat	Sangat Tinggi
4	Jaringan mandiri berpemerintahan sendiri	Musrenbang, BPD desa, forum multipihak kabupaten/kota	Tinggi
5	Kapasitas bertindak tanpa memerintah	Insentif, regulasi fasilitatif, skema kerja sama daerah	Sedang

Tabel 1. Pemetaan proposisi governance Stoker terhadap desentralisasi Indonesia

Sumber: diadaptasi dari Stoker (1998) dan Kemendagri (2025)

Dari Tabel 1 dapat diamati bahwa proposisi kedua dan ketiga memiliki tingkat relevansi paling tinggi. Hal ini mencerminkan realitas bahwa masalah tumpang tindih kewenangan dan ketergantungan fiskal merupakan dua tantangan utama desentralisasi Indonesia (Smoke, 2003; World Bank, 2003). Evaluasi Kemendagri (2025) menunjukkan bahwa dari 508 kabupaten/kota, hanya 56 (11,5%) yang berhasil meraih nilai kinerja tinggi, mengindikasikan sebagian besar daerah masih belum mampu memaksimalkan kapasitas otonominya.

Kontribusi Sosiologi Politik dalam Analisis Desentralisasi

Pendekatan sosiologi politik memperkaya analisis dengan memberikan perspektif tentang bagaimana faktor sosio-kultural dan relasi kekuasaan mempengaruhi implementasi desentralisasi. Tabel 2 menyajikan perbandingan capaian desentralisasi berdasarkan indeks modal sosial dan budaya politik di beberapa provinsi

Provinsi	Indeks Modal Sosial*	Tipe Budaya Politik	IPM 2023	Skor Kinerja Pemda	Kategori
DI Yogyakarta	Tinggi (0,73)	Partisipan	83,04	78,5	Tinggi
Jawa Barat	Sedang (0,58)	Campuran	73,15	61,3	Sedang
Sulawesi Tenggara	Sedang (0,52)	Subjek-Partisipan	72,30	58,7	Sedang
Papua Pegunungan	Rendah (0,31)	Parokial	54,21	38,2	Rendah
Kalimantan Timur	Sedang (0,55)	Subjek	77,01	62,1	Sedang

Tabel 2. Hubungan modal sosial, budaya politik, dan kinerja pemerintah daerah di Indonesia

*Indeks komposit berdasarkan kepercayaan antarwarga, kepadatan ormas, dan tingkat partisipasi pemilu (BPS, 2023; Putnam, 1993). Skor kinerja Pemda: Kemendagri (2025).

Data pada Tabel 2 memberikan indikasi kuat bahwa terdapat korelasi positif antara modal sosial, budaya politik partisipan, dan kinerja pemerintah daerah. Provinsi DI Yogyakarta, yang secara historis memiliki modal sosial tinggi dan tradisi partisipasi publik yang kuat, secara konsisten menampilkan kinerja desentralisasi lebih baik dibandingkan provinsi dengan modal sosial rendah. Temuan ini sejalan dengan argumen Putnam (1993) dalam *Making Democracy Work*, yang menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan modal sosial lebih tinggi menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.

Dimensi relasi elite juga terbukti sangat signifikan. Hadiz (2010) dan Robison & Hadiz

(2004) menunjukkan bahwa desentralisasi tidak secara otomatis menghasilkan demokratisasi substantif karena jaringan oligarki lama berhasil mereformulasi diri di tingkat lokal. Fenomena *money politics* dalam pilkada, dominasi keluarga-keluarga politik lokal (*political dynasty*), serta kooptasi lembaga pengawas oleh elite lokal merupakan manifestasi nyata dari relasi elite yang tidak demokratis meski dalam kerangka desentralisasi formal.

Kerangka Analisis Integratif: Governance Stoker-Sosiologi Politik

Integrasi teori *governance* Stoker dengan pendekatan sosiologi politik menghasilkan kerangka

analisis tiga dimensi yang saling melengkapi. Dimensi kelembagaan-prosedural mencakup kapasitas regulasi, kualitas birokrasi, dan mekanisme koordinasi antarpemerintahan. Penelitian Mahi (2016) dan Pratikno & Lay (2011) menunjukkan bahwa kelemahan kapasitas kelembagaan merupakan hambatan struktural terbesar dalam implementasi desentralisasi Indonesia. Pemerintah daerah yang berhasil adalah mereka yang mampu membangun jaringan *governance* yang melampaui hierarki administratif formal, sesuai proposisi keempat Stoker.

Dimensi sosio-kultural mencakup budaya politik, modal sosial, dan tradisi partisipasi warga. Faktor-faktor ini menentukan apakah desentralisasi benar-benar memberdayakan masyarakat atau hanya menjadi redistribusi kekuasaan antarelite. Survei BPS (2023) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang sangat bervariasi

antarwilayah, berkisar antara 23% hingga 71%, dengan rata-rata nasional hanya 41%.

Dimensi relasi kekuasaan merupakan titik pertemuan antara proposisi pluralitas institusional Stoker dan analisis elite dalam sosiologi politik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa di banyak daerah, jaringan aktor plural yang digambarkan Stoker sesungguhnya dikendalikan oleh kelompok elite lokal yang menggunakan forum-forum partisipasi sebagai *rubber stamp* bagi kepentingan mereka sendiri (Aspinall & Mietzner, 2010; Nordholt & van Klinken, 2007).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Desentralisasi

Berdasarkan integrasi kerangka teoritis, penelitian ini mengidentifikasi delapan faktor utama yang mempengaruhi efektivitas kebijakan desentralisasi di Indonesia, sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.

No.	Faktor	Dimensi Analisis	Arah Pengaruh	Intensitas
1	Kapasitas fiskal daerah	Kelembagaan-prosedural	Positif	Sangat Tinggi
2	Kualitas SDM aparatur	Kelembagaan-prosedural	Positif	Tinggi
3	Modal sosial masyarakat	Sosio-kultural	Positif	Tinggi
4	Budaya partisipan politik	Sosio-kultural	Positif	Tinggi
5	Oligarki lokal	Relasi kekuasaan	Negatif	Sangat Tinggi
6	Koordinasi pusat-daerah	Kelembagaan-prosedural	Positif	Tinggi
7	Transparansi & akuntabilitas	Relasi kekuasaan	Positif	Tinggi
8	Politik dinasti lokal	Relasi kekuasaan	Negatif	Sedang-Tinggi

Tabel 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas desentralisasi Indonesia
Sumber: disintesis dari Stoker (1998), Hadiz (2010), Putnam (1993), Kemendagri (2025)

Dari Tabel 3 terlihat bahwa kapasitas fiskal daerah dan keberadaan oligarki lokal merupakan dua faktor dengan intensitas pengaruh paling tinggi, namun dengan arah berlawanan. Temuan ini sangat relevan mengingat konteks kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,6 triliun yang diterapkan melalui Inpres No. 1 Tahun 2025. Pemotongan ini dikhawatirkan memperlemah kapasitas fiskal daerah sekaligus memberi peluang bagi elite lokal untuk memperkuat cengkeramannya melalui pengelolaan sumber daya daerah yang semakin terbatas (Times Indonesia, 2025).

Dari perspektif sosiologi politik, kebijakan pemotongan TKD ini dapat dianalisis sebagai manifestasi dari tensi antara logika sentralisasi dan logika desentralisasi. Sejalan dengan argumen

Gramsci (1971) tentang hegemoni, narasi efisiensi belanja yang diusung pemerintah pusat merupakan konstruksi wacana yang secara hegemonik melegitimasi pengurangan otonomi fiskal daerah tanpa perlu mengubah konstruksi hukum-formalnya (Times Indonesia, 19 September 2025).

Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, integrasi teori *governance* Stoker dengan pendekatan sosiologi politik mengisi kesenjangan analitis yang ada pada masing-masing pendekatan ketika digunakan secara terpisah. Teori Stoker yang cenderung bersifat deskriptif-institusional membutuhkan pembumian sosiologis untuk menjelaskan mengapa lembaga-lembaga yang secara formal telah beroperasi justru menghasilkan output yang tidak diharapkan.

Fenomena ini dalam sosiologi disebut sebagai *isomorphic mimicry*: adopsi bentuk kelembagaan tanpa substansi fungsional (Andrews et al., 2017).

Secara praktis, temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi kebijakan. Pertama, reformasi kelembagaan desentralisasi harus dibarengi dengan program penguatan modal sosial di tingkat lokal. Kedua, mekanisme pencegahan konsolidasi oligarki lokal perlu diperkuat melalui reformasi sistem pemilihan kepala daerah dan penguatan lembaga pengawasan. Ketiga, kebijakan fiskal pusat-daerah harus mempertahankan prinsip *money follows function* secara konsisten, tidak justru mengikis otonomi fiskal daerah dengan dalih efisiensi anggaran nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa integrasi teori *governance* Stoker dengan pendekatan sosiologi politik menghasilkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam mengkaji efektivitas kebijakan desentralisasi di Indonesia. Lima proposisi Stoker terbukti relevan dalam mendeskripsikan pola-pola tata kelola di tingkat daerah, sementara sosiologi politik memberikan penjelasan kausal yang lebih mendalam mengenai variasi efektivitas antardaerah.

Tiga temuan utama penelitian ini adalah: (1) efektivitas desentralisasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor kelembagaan (kapasitas fiskal dan SDM aparatur), sosio-kultural (modal sosial dan budaya politik), dan relasi kekuasaan (oligarki lokal dan akuntabilitas); (2) terdapat korelasi positif yang signifikan antara tingkat modal sosial dengan kinerja pemerintah daerah, mengonfirmasi tesis Putnam (1993); dan (3) ancaman konsolidasi oligarki lokal pasca-desentralisasi merupakan hambatan struktural terbesar bagi realisasi tujuan substantif desentralisasi, sebagaimana diidentifikasi Hadiz (2010).

Penelitian ini merekomendasikan tiga hal: penguatan kapasitas kelembagaan pemda yang terintegrasi dengan program pemberdayaan modal sosial masyarakat; reformasi sistem insentif dan pengawasan untuk mencegah konsolidasi oligarki lokal;

serta perbaikan mekanisme koordinasi fiskal pusat-daerah yang berpegang konsisten pada prinsip *money follows function*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Serang Raya dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo atas dukungan institusional dalam penyelesaian penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada para reviewer anonim atas masukan konstruktif yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2017). *Building State Capability: Evidence, Analysis, Action*. Oxford University Press.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (Eds.). (2010). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. ISEAS Publishing.
- BPS. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1983). *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Sage Publications.
- Detik.com. (2025, 12 Desember). 25 Tahun Desentralisasi dan Ujian Relevansi. Diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-8255939/>
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.
- Hutchcroft, P. D. (2001). Centralization and decentralization in administration and politics: Assessing territorial dimensions of authority and power. *Governance*, 14(1), 23-53.
- Kemendagri. (2025). *Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024*. Kementerian Dalam Negeri RI.
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Transformasi Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 115-132.
- Lipset, S. M. (1981). *Political Man: The Social Bases of Politics*. Johns Hopkins University Press.

- Litvack, J., Ahmad, J., & Bird, R. (1998). *Rethinking Decentralization in Developing Countries*. World Bank.
- Mahi, B. R. (2016). *Desentralisasi Fiskal: Teori dan Praktek di Indonesia*. LP3ES.
- Mosca, G. (1939). *The Ruling Class*. McGraw-Hill.
- MPR RI. (2026, 15 April). FGD MPR Bahas Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Diakses dari <https://www.mpr.go.id/berita/fgd-mpr-desentralisasi-otonomi-daerah-kepala-daerah>
- Nordholt, H. S., & van Klinken, G. (Eds.). (2007). *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*. KITLV Press.
- Pareto, V. (1935). *The Mind and Society: A Treatise on General Sociology*. Harcourt Brace.
- Pratikno & Lay, C. (2011). *From Populism to Democratic Polity: Problems and Challenges in Yogyakarta*. Springer.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. RoutledgeCurzon.
- Rondinelli, D. A. (1999). What is decentralization? In J. Litvack & J. Seddon (Eds.), *Decentralization Briefing Notes*. World Bank Institute.
- Sidel, J. T. (2004). Bossism and democracy in the Philippines, Thailand, and Indonesia. In J. Harriss et al. (Eds.), *Politicising Democracy*. Palgrave Macmillan.
- Smoke, P. (2003). Decentralisation in Africa: Goals, dimensions, myths and challenges. *Public Administration and Development*, 23(1), 7-16.
- Stoker, G. (1998). Governance as theory: Five propositions. *International Social Science Journal*, 50(155), 17-28.
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. (2024). Desentralisasi dan upaya peningkatan otonomi daerah. *Menara Ilmu*, 18(1), 45-60.
- Times Indonesia. (2025, 19 September). Resentralisasi TKD Terselubung. Diakses dari <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/555489/>
- World Bank. (2003). *Decentralizing Indonesia: A Regional Public Expenditure Review Overview Report*. World Bank.